

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketimpangan pendapatan merupakan masalah struktural mendasar yang mempengaruhi kualitas pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, dan efektivitas kebijakan publik. Dalam perspektif teori pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis diikuti oleh pemerataan pendapatan, terutama pada negara berkembang yang struktur ekonominya belum inklusif. Selama dua dekade terakhir, pemerintah Indonesia berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, namun arah kebijakan pembangunan menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan tersebut belum terdistribusi secara merata antar kelompok sosial. Berdasarkan kerangka teori tersebut, kebijakan pemerintah yang menitikberatkan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi mekanisme pemerataan berpotensi memperlebar kesenjangan pendapatan.

Dalam konteks regional dan global, terdapat variasi yang signifikan dalam tingkat ketimpangan pendapatan antar negara. Beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Malaysia berada pada kisaran 0,41% dan Thailand relatif lebih rendah, yaitu sekitar 0,35% pada periode yang sama. Perbedaan ini mencerminkan variasi efektivitas kebijakan redistribusi pendapatan, cakupan perlindungan sosial, serta struktur ekonomi di masing-masing negara.

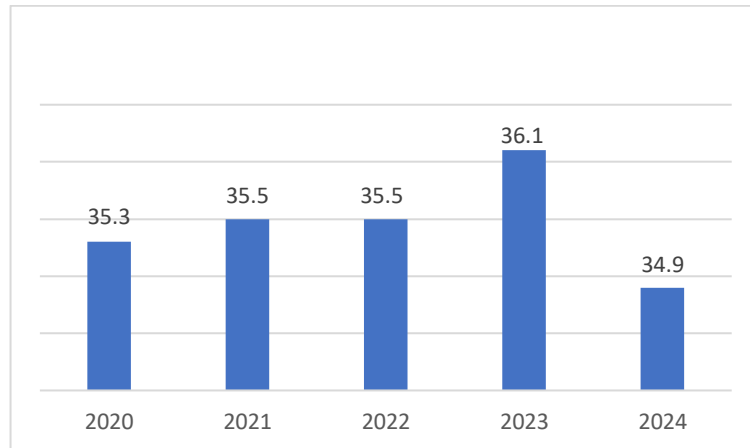
Secara global, negara-negara maju dengan sistem jaminan sosial yang solid dapat menjaga ketimpangan pada tingkat yang lebih terkelola, meskipun mereka menghadapi keterlambatan dalam pertumbuhan ekonomi. Perbandingan ini menunjukkan bahwa ketimpangan bukanlah fenomena yang terpisah, melainkan

sangat dipengaruhi oleh kualitas pertumbuhan ekonomi, efektivitas belanja publik, serta kemampuan sistem keuangan dalam memperluas akses ekonomi bagi masyarakat.

Meskipun Indonesia terus mencatat pertumbuhan ekonomi yang positif setiap tahunnya, peningkatan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan kesejahteraan masyarakat. Data menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan masih menjadi permasalahan. Penelitian (Putri & Anggraini, 2024) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan, yang berarti peningkatan ekonomi dapat mendorong pemerataan distribusi pendapatan.

Rentang analisis dari tahun 2002 hingga 2024 memberikan peluang untuk menelusuri perubahan kondisi sosial ekonomi dalam perspektif jangka menengah panjang, sekaligus menempatkan penelitian ini pada konteks peristiwa besar seperti krisis keuangan global 2008 dan pandemi COVID-19. Kedua momentum tersebut terbukti memengaruhi arah pendapatan masyarakat dan kebijakan fiskal pemerintah, sehingga relevan untuk memahami bagaimana ketimpangan berkembang di tengah tekanan eksternal dan respons kebijakan yang dinamis. Penggabungan variabel demografis, ekonomi, dan fiskal dalam konstruksi empiris terpadu diharapkan untuk memperkaya pemahaman tentang bagaimana interaksi di antara elemen-elemen ini dapat memperburuk atau mengurangi ketidaksetaraan. Mengingat data nasional yang ada, angka Rasio Gini yang merupakan salah satu titik referensi mendasar untuk penelitian ini disebarluaskan oleh BPS, sehingga

memberikan validasi empiris bahwa tantangan pemerataan pendapatan tetap ada sebagai topik terkait yang menjamin eksplorasi lebih lanjut.



Sumber : World bank, diolah

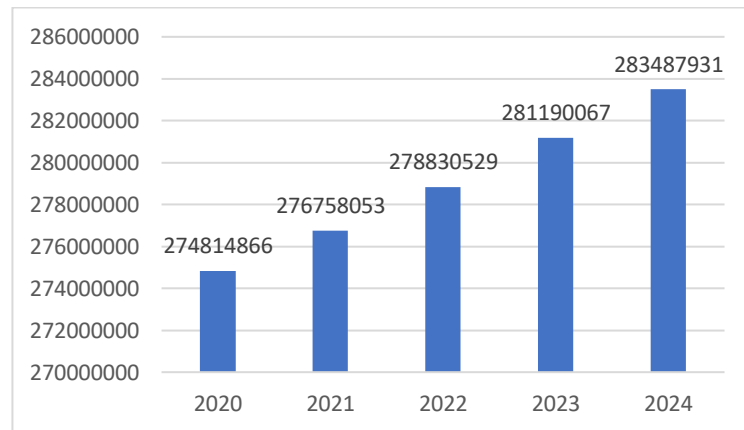
Gambar 1.1 Perkembangan Rasio Gini Indonesia 2020-2024 (Persen)

Untuk memperoleh gambaran empiris mengenai dinamika ketimpangan tersebut, perkembangan rasio Gini digunakan sebagai indikator utama dalam mengukur tingkat pemerataan pendapatan di Indonesia, sebagaimana disajikan Pada Gambar 1.1 menunjukkan perubahan Rasio Gini di Indonesia selama periode 2020–2024 yang bergerak fluktuatif dan mengindikasikan adanya ketimpangan pendapatan yang bersifat berkelanjutan. Pada tahun 2020, rasio Gini tercatat sebesar 35,3 % dan meningkat menjadi 35,5 % pada periode 2021–2022, yang menunjukkan bahwa proses pemulihan ekonomi pascapandemi belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan distribusi pendapatan. Kondisi tersebut semakin terlihat pada tahun 2023 ketika rasio Gini meningkat menjadi 36,1 %, mengindikasikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi lebih cepat dinikmati oleh kelompok berpendapatan tinggi dibandingkan masyarakat berpendapatan rendah. Meskipun pada tahun 2024 rasio Gini menurun menjadi 34,9 % penurunan tersebut belum

dapat diartikan sebagai perbaikan struktural yang stabil karena pola fluktuasi masih menunjukkan kerentanan distribusi pendapatan terhadap tekanan ekonomi. Pola ketimpangan yang tidak stabil tersebut mengindikasikan bahwa dinamika distribusi pendapatan tidak hanya dipengaruhi oleh laju pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh faktor struktural lainnya, seperti tekanan demografis, efektivitas belanja publik dalam mendorong pemerataan, serta akses masyarakat terhadap sumber pembiayaan dan kesempatan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan analisis empiris yang komprehensif untuk mengkaji pengaruh jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, belanja publik terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme pembentukan ketimpangan dan implikasinya terhadap kebijakan pembangunan yang inklusif.

Dalam perspektif teori transisi demografi dan hipotesis Kuznets, perubahan struktur kependudukan dan pola pertumbuhan ekonomi memiliki implikasi langsung terhadap distribusi pendapatan dan tingkat ketimpangan suatu negara. Selain itu, teori peran negara dalam ekonomi kesejahteraan menekankan bahwa kapasitas belanja publik menentukan kemampuan negara dalam menjaga pemerataan akses layanan dasar. Secara keseluruhan, kondisi tersebut menegaskan bahwa ketimpangan pendapatan di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh efektivitas kebijakan fiskal dan kualitas pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan dinamika sosial yang melekat pada struktur kependudukan. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap faktor penyebab ketidaksetaraan, aspek demografi menjadi elemen penting dalam analisis, terutama

karena perubahan jumlah dan komposisi penduduk membawa konsekuensi langsung pada distribusi kesejahteraan. Dalam konteks pembangunan nasional, jumlah penduduk yang terus meningkat menciptakan tuntutan yang lebih besar terhadap penyediaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Apabila kapasitas negara dalam memenuhi kebutuhan tersebut tidak berkembang sejalan, maka kesenjangan akses terhadap layanan dasar berpotensi melebar dan memperburuk ketimpangan sosial-ekonomi antarkelompok masyarakat.



Sumber : World bank, diolah

Gambar 1.2 Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2020 – 2024 (Jiwa)

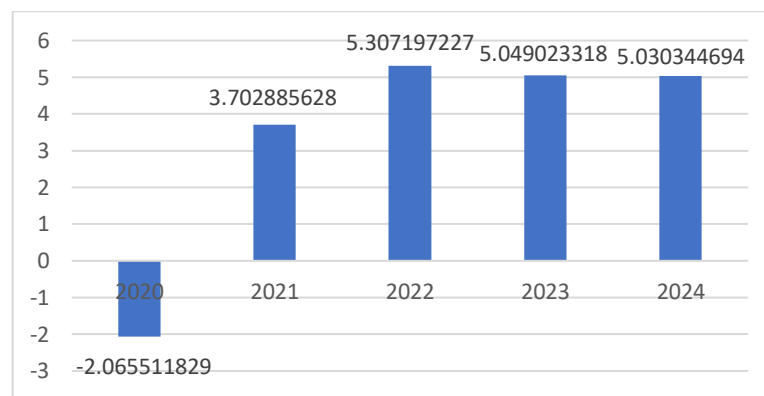
Secara demografis, Indonesia telah mengalami peningkatan populasi yang signifikan. Data dari World Bank mencatat bahwa total penduduk Indonesia mencapai sekitar 283,49 juta jiwa pada tahun 2024. Kenaikan jumlah penduduk Indonesia dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 1.2 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia tumbuh secara konstan dari tahun 2020 hingga 2024, yang mengindikasikan beban demografis yang makin besar bagi negara.

Pertumbuhan absolut populasi tersebut bukan hanya soal bertambahnya jumlah orang, tetapi juga mencerminkan tantangan dalam penyediaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang harus menyesuaikan dengan jumlah dan komposisi demografi yang terus berubah. Secara khusus, meningkatnya populasi usia produktif berarti bahwa pasar tenaga kerja dan lapangan kerja depan juga harus tumbuh agar tidak meninggalkan kelompok masyarakat yang rentan. Selain itu, meskipun persentase pertumbuhan tahunan penduduk menunjukkan tren melambat (misalnya laju pertumbuhan sekitar 0,8 % pada 2024) nilai absolut tetap meningkat dan menciptakan tekanan struktural jangka panjang. tekanan demografis dapat berinteraksi dengan variabel pertumbuhan ekonomi dan belanja publik dalam menentukan tingkat ketimpangan.

Pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerataan ekonomi. Peningkatan populasi tidak selalu sejalan dengan ketersediaan lapangan kerja dan distribusi pendapatan yang adil antarwilayah. (Mukhlis & Hidayah, 2018) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi di wilayah aglomerasi seperti Jawa Timur tidak secara signifikan mengurangi ketimpangan antarwilayah, yang menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi dan kepadatan penduduk belum tentu berdampak pada pemerataan.

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan berkelanjutan dalam kegiatan perekonomian yang menghasilkan lebih banyak barang dan jasa, yang diikuti oleh peningkatan kapasitas produksi bersama dengan investasi yang memadai dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan

yang lebih luas, seperti mengurangi kemiskinan dan meningkatkan distribusi pendapatan yang lebih adil. Pertumbuhan ekonomi adalah proses pertumbuhan kegiatan ekonomi yang menghasilkan peningkatan produksi barang dan jasa dalam masyarakat (Hastin, 2022). Dari satu periode ke periode berikutnya, kapasitas suatu negara untuk memproduksi barang dan jasa cenderung meningkat. Peningkatan kapasitas ini terjadi karena faktor-faktor produksi terus bertambah, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya.



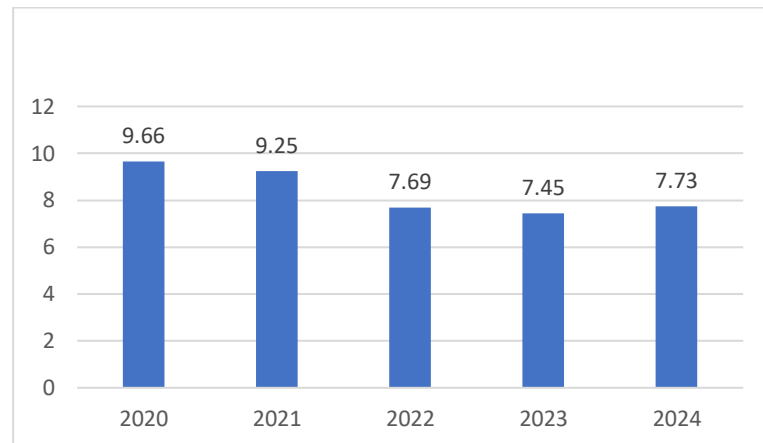
Sumber : World Bank, diolah

Gambar 1.3 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2020 – 2024 (Persen)

Kemajuan laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan bagaimana performa ekonomi negara menanggapi berbagai perubahan dan goncangan ekonomi. Agar mendapatkan pandangan praktis tentang situasi tersebut, Pada Gambar 1.3 menunjukkan bahwa pola pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama 2020–2024 tidak hanya menggambarkan fluktuasi angka, tetapi juga ketahanan struktural yang mendapat tekanan besar. Penurunan yang tajam –2,06 % pada 2020 mengungkap titik rapuh perekonomian nasional, disusul pemulihan 3,70 % pada 2021 yang masih belum mampu menutup sepenuhnya dampak krisis. Pertumbuhan kembali

stabil di kisaran 5 % pada 2022–2024, namun stabilitas tersebut belum menjamin pemerataan manfaat karena kelompok berpendapatan tinggi pulih lebih cepat dibandingkan masyarakat berpenghasilan rendah. Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan yang tampak solid belum tentu inklusif, terutama ketika produktivitas antarwilayah dan kualitas tenaga kerja masih berbeda lebar. Dalam situasi seperti ini, pertumbuhan berisiko memperbesar ketimpangan apabila tidak dibarengi kebijakan belanja publik yang tepat sasaran serta transformasi ekonomi yang sistematis, sehingga kajian mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi, belanja publik, dan ketimpangan menjadi semakin penting untuk dilakukan.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi yang stabil tentu tidak dapat dipisahkan dari peran aktif pemerintah dalam mengelola kebijakan fiskal. Dalam upaya mengurangi kesenjangan, pemerintah telah meningkatkan belanja publik pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun, berbagai kajian menunjukkan bahwa alokasi tersebut belum sepenuhnya efektif dalam menekan tingkat ketimpangan. (Alamanda, 2020) menjelaskan bahwa alokasi anggaran pemerintah, terutama untuk subsidi sosial, belum memberikan efek signifikan terhadap penurunan kesenjangan, sementara belanja infrastruktur menunjukkan pengaruh positif meskipun belum optimal secara nasional. Selain faktor ekonomi makro, peran kebijakan fiskal pemerintah melalui belanja publik juga berpengaruh penting dalam mengurangi ketimpangan.



Sumber : World Bank, diolah

Gambar 1.4 Belanja Publik Indonesia Tahun 2020 – 2024 (Persen)

Selain Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Publik merupakan alat kebijakan fiskal yang menunjukkan bagaimana pemerintah berperan dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan meningkatkan kesetaraan kesejahteraan. Perubahan arah dan skala pengeluaran pemerintah seiring waktu mencerminkan tanggapan pemerintah terhadap situasi ekonomi dan fokus utama pembangunan negara. Untuk mengamati dinamika ini secara praktis, Pada Gambar 1.4 menunjukkan perubahan belanja publik Indonesia sepanjang 2020–2024 yang bergerak naik turun dan merefleksikan kondisi fiskal yang jauh lebih kompleks daripada sekadar pergeseran angka anggaran. Pada tahun 2020, belanja publik berada pada level tertinggi, sekitar 9,66 % karena pemerintah perlu mengalokasikan dana besar untuk merespons krisis pandemi. Setelah masa darurat berlalu, anggaran tersebut turun menjadi 9,25% pada 2021 dan menurun lebih tajam ke 7,69% pada 2022 sebagai upaya konsolidasi fiskal, yang sekaligus mengisyaratkan semakin sempitnya ruang untuk mendanai program perlindungan kelompok rentan. Pada 2023 dan 2024, belanja publik bergerak relatif stabil di rentang 7,45 hingga 7,73% tetapi kestabilan ini tidak

langsung berarti pemerataan karena kemampuan pemerintah memperluas pelayanan masih terbatas sementara tuntutan masyarakat terus meningkat. Pola fluktuatif tersebut juga mengungkap persoalan struktural yang lebih dalam. ketika belanja publik menurun, daerah dengan infrastruktur minim dan akses layanan dasar terbatas menjadi yang paling merasakan dampaknya. Dalam konteks ketimpangan, hal ini menegaskan bahwa besarnya alokasi anggaran tidak otomatis menjamin distribusi yang adil, sebab efektivitas penyaluran belanja publik masih belum merata di berbagai wilayah. Karena itu, hal ini bukan hanya menampilkan perubahan persentase belanja negara, tetapi juga menjadi peringatan bahwa kualitas pengelolaan dan ketepatan sasaran anggaran sangat menentukan kemampuan negara menekan ketimpangan dan tanpa strategi yang solid, dinamika fiskal tersebut justru berpotensi memperlebar kesenjangan kesejahteraan.

Meskipun secara umum peningkatan belanja publik menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pembangunan, sejumlah penelitian menemukan bahwa distribusi anggaran tersebut belum sepenuhnya merata antarwilayah. Penelitian yang dilakukan oleh (Arlantarik & Suseno, 2024) menunjukkan bahwa belanja publik yang terkonsentrasi di daerah dengan kapasitas fiskal tinggi cenderung memperbesar ketimpangan antarwilayah, karena daerah tertinggal tidak menerima alokasi yang proporsional terhadap kebutuhannya.

Pada beberapa periode, kenaikan belanja publik justru terjadi bersamaan dengan peningkatan ketimpangan ekonomi, terutama karena distribusi anggaran yang belum merata antarwilayah. Daerah dengan kapasitas fiskal tinggi cenderung menikmati dampak ekonomi yang lebih besar dibandingkan daerah tertinggal,

sehingga memperlebar kesenjangan antarwilayah. Hal ini menegaskan bahwa besarnya nominal pengeluaran pemerintah bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pemerataan. Efektivitasnya sangat bergantung pada struktur dan arah alokasi anggaran, serta seberapa besar porsi belanja yang benar-benar menyentuh kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Berdasarkan fenomena di atas, penelitian ini berfokus pada analisis faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia selama periode 2002–2024. Ketimpangan pendapatan yang masih bertahan meskipun pertumbuhan ekonomi nasional menunjukkan tren positif mengindikasikan adanya persoalan struktural dalam pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya ketika dinamika jumlah penduduk dan kebijakan belanja publik terus berubah sementara hasil pembangunan belum dinikmati secara merata. Kondisi ini menjadikan penelitian mengenai ketimpangan pendapatan semakin urgen, karena tanpa analisis empiris yang komprehensif kebijakan pembangunan berpotensi hanya mendorong pertumbuhan ekonomi secara agregat tanpa diikuti oleh pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, penelitian ini berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi peran pertumbuhan ekonomi, tekanan demografis, dan belanja publik terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan makro berbasis time series jangka panjang dengan data nasional Indonesia periode 2002–2024 yang mengintegrasikan faktor demografis, ekonomi, dan fiskal, serta penggunaan belanja publik sebagai persentase PDB dalam satu model empiris yang memberikan perspektif lebih komprehensif dibandingkan penelitian terdahulu yang umumnya menganalisis faktor-faktor

tersebut secara terpisah. dengan demikian peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **Pengaruh Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Publik Terhadap Tingkat Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Pada Tahun 2002 – 2024.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengaruh Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Publik secara parsial terhadap Tingkat Ketimpangan Pendapatan di Indonesia tahun 2002-2024?
2. Bagaimana Pengaruh Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Publik secara bersama terhadap Tingkat Ketimpangan Pendapatan di Indonesia tahun 2002-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Pengaruh Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Publik secara parsial terhadap Tingkat ketimpangan Pendapatan di Indonesia tahun 2002-2024.
2. Mengetahui Pengaruh Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Publik secara bersama terhadap Tingkat Ketimpangan Pendapatan di Indonesia tahun 2002-2024.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi tambahan dan memberikan penelitian yang lebih baru tentang komponen-komponen yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia. Salah satu topik yang belum banyak diteliti adalah penggunaan variabel belanja publik sebagai faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Dengan demikian, diharapkan pembaca akan mendapatkan wawasan baru dan pengetahuan baru.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini di digunakan untuk memperdalam pemahaman materi yang telah didapat selama perkuliahan serta menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis, terutama yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia.

2. Bagi Pemerintah

Penulis berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai inspirasi dan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik Lembaga, pemerintah maupun swasta dalam meningkatkan ketimpangan pendapatan di Indonesia.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu di negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang setiap variabelnya diperoleh dari *World Bank*, Badan Pusat Statistika serta beberapa sumber media online yang relevan dan terpercaya.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2025/2026 mulai bulan Oktober 2025 yang diawali dengan pengajuan judul. Adapun rincian kegiatan penelitian ini di tampilkan dalam tabel 1.1 berikut: